

TRANSFORMASI PERAN KADER PEREMPUAN PKS: INTERAKSI PEREMPUAN DALAM RANAH DOMESTIK

¹NovaYuliati, ²DedeLilis Ch, ³MochamadRochim

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: nova_yuliati@yahoo.com, delilisubandy@gmail.com, mrochim5571@gmail.com

Abstrak. *Konstelasi peranperempuan di ranah domestik dan ranah politik merupakan gejala global. Perubahan situasi politik Indonesia membuat representasi perempuan menjadi narasi besar dalam demokrasi Indonesia. Perempuan Indonesia mempunyai hak penuh untuk menjadi aktor politik. Berbekal potensi, skill dan konstituen sebagai modal berpolitik, maka kiprah perempuan Indonesia di ranah politik menjadi sebuah keniscayaan. Pada sisi lain, perempuan harus melakukan transisi dari ranah domestik ke ranah politik. Penelitian ini berupaya mengkaji perspektif perempuan, mengungkap pengelolaan komunikasi dalam ranah domestik untuk mensinergikan peran perempuan di dua ranah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Desain kasus tunggal dengan informan kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPC Cimahi sejumlah 3 orang. Temuan penelitian menghasilkan pola pembagian peran kader perempuan PKS berupa; 1) fungsi peran terbagi, 2) moderasi tugas-tugas domestik. 3) penyertaan seluruh anggota keluarga, 4) keterlibatan suami dalam keputusan dan kegiatan domestik, 5) adanya pembagian kerja situasional. Adapun komunikasi yang dibangun kader perempuan dalam ranah domestik menciptakan iklim komunikasi yang kondusif yang melibatkan dukungan pasangan, keterbukaan antarpasangan, adanya alokasi waktu untuk berinteraksi secara intens dengan disertai kesediaan mendengarkan dari keduanya.*

Katakunci: *pengelolaan komunikasi, transformasi, peran perempuan, ranah domestik*

1. Pendahuluan

Peran perempuan kini tidak hanya terbatas pada wilayah domestik, padahal hal seputar pengelolaan urusan rumahtangga. Perubahan yang terjadi mengakibatkan pergeseran peran perempuan untuk semakin aktif terlibat di luar wilayah domestik. Keterlibatan perempuan di ranah public dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi, melainkan merambah pada sektor yang sangat strategis yaitu sector politik. Amanat UU Pemilu dan UU Partai Politik membuka lebar-lebar pintu politik untuk dimasuki perempuan. Diskursus publik tentang keterwakilan perempuan di panggung politik memunculkan pula wacana perempuan dan komunikasi politik. Wacana keterwakilan perempuan di wilayah politik telah menjadi topik penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Jurnal *Sosial Demokrasi*(2009) mencatat bahwa, “representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah jender (*gender democracy*)”(2009:84). Keterlibatan lebih banyak perempuan di ranah politik dapat memberdayakan perempuan dalam kebijakan strategis khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang tidak bias gender dan menyuarakan kepentingan perempuan.

Hal ini disebabkan karena bagaimanapun perempuan tentu lebih paham apa yang dibutuhkan kaumnya dibandingkan dengan laki-laki.

Tantangan perempuan Indonesia untuk terjun berpolitik ditambah dengan tantangan kontestasinya di ranah domestik. Tantangan di ranah ini tidak bisa diabaikan mengingat perempuan tidak bisa memilih salah satu peran, ia harus dapat menyelaraskan keduanya. Persepsi peran domestik kurang-kurangnya dapat menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan Indonesia, seperti temuan yang didapat Andriana dkk. (2012:312). Penelitian mereka menemukan kenyataan bahwa masyarakat dan keluarga di Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak peran perempuan dalam politik. Perempuan di sana dihadapkan pada dua pilihan jika mereka ingin menjadi politisi: meninggalkan keluarga atau meninggalkan partai politik. Faktanya, 50 % anggota legislatif perempuan di NTB bercerai, sebagian besar dari mereka tidak mendapat dukungan dari suami ketika terlibat di arena politik.

Komunikasi menjadi pilar pada upaya yang dilakukan perempuan dalam menjalankan dan menyelaraskan peran domestik dan peran politiknya, serta membangun komunikasi antara keluarga di satu pihak dan partai di pihak lainnya. Tuntutan peran domestik membuat perempuan perlu membangun interaksi yang tepat dalam perkawinannya karena komunikasi merupakan pilar penting bagi tegaknya perkawinan, seperti pernyataan Montgomery bahwa *quality communication is central to quality marriage* (Sadarjoen, 2005:72). Tugas ganda perempuan di luar rumah akan memunculkan dikotomi antara peran domestik dan peran publik yang harus diimbangnya sehingga kaum perempuan ini tidak terombang ambing antara karir politik dan rumah tangga. Bagaimana kedua peran tersebut bisa berjalan selaras tentu memerlukan berbagai upaya dan kendala yang menarik untuk diteliti.

Adapun PKS dipilih sebagai lokus partai berdasarkan kriteria PKS sebagai partai kader yang telah memiliki sistem jejaring, maka PKS relatif tidak memiliki kesulitan untuk memenuhi kuota 30 % sehingga dapat dinilai PKS menjadi partai yang ‘ramah gender’, mempersiapkan kader perempuannya dari segi kuantitas (jumlah) dan kualitas (kompetensi)-nya .

Berdasarkan latar belakang fenomena yang sudah dipaparkan, penelitian ini bermaksud menelusuri bagaimana interaksi yang dibangun oleh kader perempuan PKS dalam mensinergikan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga sekaligus berperan di panggung politik. Berangkat dari fenomena dan persoalan perempuan sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini mengkaji bagaimana transformasi peran yang dilakukan melalui pengelolaan komunikasi dan negosiasi peran yang dilakukan kader perempuan PKS DPC Cimahi dalam ranah domestik.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka untuk menggalinya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Berangkat dari persoalan perempuan sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan masalahnya menjadi: “Bagaimana transformasi peran kader perempuan PKS, khususnya interaksi perempuan dalam ranah domestik?” Kemudian, agar fokus pada persoalan yang akan diteliti, maka pertanyaan penelitian dirinci sebagai berikut : (1) Bagaimana negosiasi peran kader perempuan PKS di ranah domestik? serta (2) bagaimana pengelolaan komunikasi kader perempuan PKS di ranah domestik?

Urgensi penelitian ini ialah karena keterlibatan perempuan di sektor publik merupakan fenomena penting dalam era modernisasi dan globalisasi. Diawali keterlibatan perempuan ke dalam pasar kerja yang mampu memberikan gambaran terjadinya pergeseran pembagian kerja secara seksual. Implikasinya, terjadi pergeseran

pembagian kerja dalam sistem patriarki yang selama ini terjadi dalam banyak komunitas masyarakat dunia. Saat ini batas sektor publik dan domestik sebagai batas antara wilayah laki-laki dan perempuan menjadi kabur. Masuknya perempuan ke dalam sector public bermula pada kekuatan dan daya tawar mereka di dalam relasinya dengan laki-laki. Perempuan yang berkiprah di luar rumah dapat mengaktualisasikan dirinya sehingga ia bisa mandiri dan memiliki kekuasaan dalam konteks hubungan matrimonialnya.

1.1 Negosiasi dan Konsep Peran Kader Perempuan PKS

Peran antara laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan biologis dan fisiologis yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan. Peran lebih menitik beratkan pada konstruksi sosial yang ditanamkan oleh masyarakat yang dianggap tepat untuk pria dan wanita. Karenanya kita dapat membedakan penyebutan 'pria dan perempuan' sebagai penyebutan yang merujuk pada jenis kelamin, sedangkan peran adalah istilah yang merujuk pada gender. Sejak paham feminisme merebak, sikap keperempuanan dianggap sebagai keterbatasan perempuan mendapat kebebasan penuh. Sikap feminin ini membuat orientasi perempuan terbatas di wilayah domestik dan menjadi upaya marginalisasi kaum laki-laki terhadap banyak potensi yang sesungguhnya dimiliki perempuan.

Kuasa domestik perempuan dan kuasa publik laki-laki sebenarnya berakar dari perdebatan panjang apakah sifat feminin adalah sifat alami, biologis atau yang biasa disebut sebagai *nature* ataukah *culture* sebagai konstruksi yang tidak sealamiah faktor biologis. Kaum feminis menganggap hal tersebut sebagai *culture* (Megawangi dalam Anshori, 1997:172). Karena itu mereka menyarankan supaya anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang 'bebas gender' (*gender free*), tanpa harus memperkenalkan stereotipe gender (pendidikan androgini)". Ada perbedaan besar antara seks dan gender, menurut Newman, *sex is used to refer to a person's biological maleness or femaleness, gender designated psychological, social and cultural aspects of maleness and femaleness* (Newman, 1997:141). Pendapat-pendapat tersebut nyata menyuarakan bahwa gender adalah sebuah peran sosial, yang pada akhirnya berimplikasi pada berbagai perangkat seperti hak, harapan, kewajiban dan keistimewaan yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan terlembagakan lewat institusi-institusi sosial. Satu diantaranya adalah keluarga, dimana dalam keberlangsungan keluarga ada perbedaan yang jelas, laki-laki dan perempuan memiliki norma dan kewajiban keluarga yang berbeda.

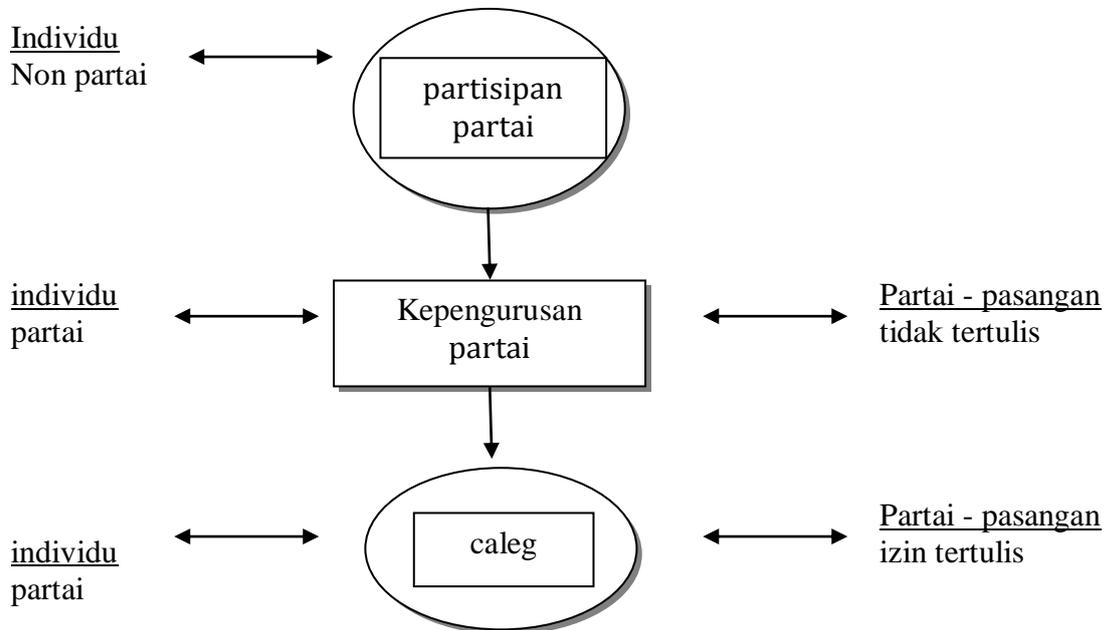
Seiring perubahan jaman, terjadi pula pergeseran relasi gender dalam berbagai bidang kehidupan. Kini semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam sektor ekonomi dan politik. Peran dalam perkawinan dan pengasuhan lambat laun juga semakin seimbang antara istri dan suami. Dewasa ini sikap publik terhadap peran gender relatif berubah signifikan, terbukti dari perubahan konsep kehidupan yang dianggap 'ideal', diantaranya konsep keluarga. Ayah, atau laki-laki tidak lagi satu-satunya yang bekerja di luar rumah, banyak perempuan, para ibu yang memiliki aktivitas publik. Perubahan ini tidak hanya diinginkan oleh perempuan, tetapi disetujui pula oleh laki-laki. Hasil survey Roper tahun 1995 menunjukkan pendapat sebagian besar responden yang menyatakan sikap sebagai berikut, "*it is not fair for men to be the sole decision maker in the household. The ideal lifestyle is to be in a marriage in which*

husband and wife share responsibilities; including work, house keeping and child care”(Roper dalam Andersen & Taylor, 2003:282).

Jauh sebelumnya, hasil riset James L Peacock tahun 1973 menemukan bahwa, “sistem sosial yang terdapat di Jawa, Sunda, Aceh, Dayak (Iban) dan Ambon adalah sistem bilineal yang hubungan antara perempuan dan laki-laki saling mengisi. Perubahan yang terjadi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri memunculkan perubahan terhadap konsep perkawinan dan keluarga serta pola pembagian kerja tradisional”(Nunuk dalam Anshori, 1995:162).

Perubahan cara pandang ini terlihat dalam konsep keluarga kader perempuan PKS. Peran dan pembagian kerja dalam rumah tangga tidak lagi ‘terpusat’ tetapi ‘berbagi’. Tidak ada aturan tertulis yang dibuat, namun ada komitmen kuat yang mendukung peran informan sebagai kader politik dan anggota DPRD.

Sebelumnya, peneliti akan memaparkan ada kondisi pendukung yang membuat informan lebih leluasa dalam pembagian peran rumah tangganya. Faktor pendukung ini adalah keterlibatan PKS sebagai partai dalam membangun ketahanan keluarga menghadapi kiprah politisi kader perempuannya. Ketika informan memutuskan untuk bergabung dalam kepengurusan partai dan menjadi kader PKS, maka PKS sebagai intitusi partai melakukan pembicaraan dengan informan dan suaminya. Banyak hal dibicarakan, termasuk komitmen suamidan dukungan dalam tugas-tugas rumah tangga. Komitmen ini sifatnya tidak terdokumentasikan atau tidak tertulis. Lebih jauh apabila informan dipilih oleh PKS sebagai calon legislatif, maka pembicaraan partai dengan suami istri tersebut lebih kompleks dan terinci dimana ada penyertaan surat izin suami. Ini dilakukan agar kader perempuan dapat berkiprah di ranah politik tanpa harus merasa terbebani mengorbankan rumah tangganya. Pelibatan kader perempuan PKS dapat terlihat lewat ilustrasi berikut.



Gambar 1. Pola Pelibatan Partai-Pasangan Kader Perempuan dalam Negosiasi Peran Publik & Domestik

Dukungan suami menjadi semacam *privilege* bagi informan karena mau tidak mau, tuntutan keluarga dan tuntutan tugas publik menjadi tekanan besar bagi perempuan dengan tugas ganda. Kurang-kurangnya pengertian dan dukungan pasangan, perempuan yang berkiprah di panggung politik akan kesulitan dalam mempertahankan rumah tangganya. Riset Andriana dkk (2012) memaparkan kondisi itu:

“The main obstacle for Indonesian women to become legislature candidates is cultural perceptions about the roles of the women in society. For example, In West Nusa Tenggara (NTB), society and family tend to decline women’s role in politics. Woman has two choices when they decide to be a politician, namely leave her family or resign from political parties. In fact, 50% of female parliament members in NTB are divorced women. Most of them did not get support from their husband to get involve in political arena. It happens due to a strong patriarchal culture in the society” (Andriana, 2012).

Pada umumnya peran suami dan istri pada para informan tidak terkotak-kotak dan terpisah, melainkan berbaur walaupun terlihat ada dominasi peran untuk masing-masing pihak. Informan adalah perempuan dengan berbagai atribut kesibukan yang melekat dalam dirinya. Namun dari hasil wawancara nampak bahwa informan dapat mengatasi peran domestik dan publiknya. Informan menyatakan bahwa suami mereka turut serta dalam menyelesaikan tugas-tugas domestik. Pembagian tugas tidak dinyatakan dengan tegas tapi lebih banyak atas dasar sukarela.

Selama ini perempuan PKS sering dinilai sebagai sosok konvensional. Bila dilihat dari tampilan luarnya, mereka sering dilihat tidak modern. Demikian pula ketika peneliti melakukan wawancara, secara konsep informan dapat dikategorikan dalam skema pemikiran yang masih konvensional, tetapi dibarengi dengan argumen yang kuat. Namun khusus dalam pembagian peran domestik, nampak bahwa informan memakai cara pandang baru walaupun tidak secara lugas diekspresikan dalam argumen mereka. Nyaris tidak ada kendala ketika para suami melakukan tugas-tugas domestik. Hal ini bisa jadi karena suami informan berpendidikan tinggi sehingga memiliki cara pandang yang relatif tidak bias gender.

Fenomena di atas mungkin bisa diinterpretasikan sebagai cara pandang baru terhadap pernikahan. Cara pandang baru ini adalah cara pandang pernikahan yang dulu dilihat sebagai *‘intitution’* (lembaga) tapi kini dipandang sebagai *‘companionship’* (persahabatan). Bila mengacu pada Surbakti, keluarga masa kini lebih bernuansa persahabatan dengan ciri: (1) Keintiman dan keakraban antara anggotanya terjalin dengan kuat; (2) Kebebasan berpendapat setiap anggotanya terjamin; (3) Pembagian peran didasarkan kepada kemampuan, bukan hirarki; (4) Relasi lebih didasarkan pada kesetaraan peran dan persamaan hak; (5) Tercipta atmosfer rumah tangga yang menyenangkan; (6) Setiap orang bebas memilih dan menentukan profesinya serta (7) Bebas dari tekanan yang berpotensi menimbulkan stress (Surbakti, 2008).

Yang menarik dari hasil penelitian ini adalah temuan bahwa ketiga informan tidak memiliki pembantu atau asisten rumah tangga. Perubahan pembagian peran domestik kader perempuan PKS menjadi temuan penelitian berupa konsep peran yang bisa dirinci sebagai berikut: (1) Konsep peran terbagi; (2) Moderasi tugas-tugas domestik; (3) Menyertakan seluruh anggota keluarga (4) Suami ikut serta dalam keputusan dan kegiatan domestik; dan (5) Pembagian kerja situasional.

1.2 Komunikasi Kader Perempuan PKS di Ranah Domestik

We cannot not communicate adalah adagium komunikasi yang sangat terkenal. Fitrahnya manusia tidak ingin sendirian, manusia memerlukan hubungan, karenanya manusia perlu untuk berkomunikasi. Adler dan Towne menunjukkan 3 aspek penting komunikasi yaitu sebagai: (1) kebutuhan fisik dimana ketiadaan komunikasi berdampak pada kesehatan seseorang. Itulah penjelasan logis mengapa ada penelitian yang mendapati fakta bahwa seseorang yang banyak teman cenderung lebih bahagia ketimbang sebaliknya; (2) kebutuhan identitas dimana komunikasi adalah satu-satunya cara kita mempelajari diri kita; dan (3) kebutuhan sosial, dimana komunikasi vital adalah sarana seseorang terhubung dengan orang lainnya. Saking pentingnya komunikasi, beberapa ahli bahkan menyebut '*communication is the primary goal of human existence.*'

Bagaimana ketiga kader perempuan PKS menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dalam situasi perkawinannya akan menunjukkan determinasinya dalam mempertahankan perkawinan. Secara teoritis dan fakta, konflik yang terjadi dalam perkawinan akan mendingin dan menjadi suatu proses akomodasi atau disintegrasi yang berujung pada perceraian. Sadarjoen dengan mengutip Murdock menyatakan bahwa, "perkawinan baru terjadi kalau pasangan suami istri mengelola masalah krusial secara bersama" (Sadarjoen, 2005).

Semua penelitian tentang kualitas pernikahan menemukan bahwa komunikasi positif antara pasangan suami-istri adalah ciri utama pernikahan berkualitas. Markman mengemukakan bahwa "pasangan yang berhasil dalam komunikasi cenderung lebih berbahagia dalam perkawinan" (Markman dalam Wolf, 1996:350). Menurut Strong dan DeVault, salah satu fungsi utama pernikahan adalah "menciptakan keintiman atau kedekatan dan komunikasi merupakan fondasi utama pernikahan karena keintiman dan komunikasi terjalin satu sama lain serta merupakan suatu kesatuan" (Strong & DeVault, 1986). Kita membuka diri melalui komunikasi dan lewat pengungkapan dirilah tumbuh keintiman. Mungkin banyak pasangan suami-istri mengeluhkan bahwa mereka tidak berkomunikasi, padahal sesuatu yang lebih mendasar sesungguhnya sedang terjadi yakni mereka tidak lagi terlibat dalam keintiman atau kedekatan. Karenanya, komunikasi tidak sekadar menyoal kemampuan mendiskusikan masalah dan mengatasi konflik, namun komunikasi dibutuhkan demi perkawinan itu sendiri, karena komunikasi menandakan keberadaan pasangan, menciptakan pembicaraan yang menyenangkan, pertukaran senyuman dan sentuhan, serta penanda cinta lainnya.

Komunikasi tidak dapat diabaikan dalam interaksi sosial. Salah satu faktor penting penyebab kegagalan relasi individu adalah lemahnya pengelolaan komunikasi. Semua bentuk komunikasi membutuhkan keterampilan karena keberhasilan komunikasi senantiasa melibatkan banyak faktor yang antara satu dan lainnya saling berkaitan. Partisipasi komunikasi harus dapat menciptakan suasana atau iklim komunikasi kondusif yang ditandai dengan adanya komunikasi yang suportif. Gibb menyatakan bahwa "komunikasi suportif akan menghindarkan seseorang dari perangkap psikologis yang dapat menyebabkan seseorang bereaksi negatif" (Tubbs, 2001:56).

Secara sederhana, komunikasi bisa dilihat sebagai proses mengirim dan menerima pesan. Komunikasi tidak berlangsung pasif karena pesan harus dimaknai atau diinterpretasi oleh penerimanya. Pesan yang kita sampaikan dan kita terima mengandung tanda-tanda verbal dan nonverbal. Konten dasar pesan kita dapatkan dari komponen verbal, sementara nonverbal mengekspresikan apa yang disebut sebagai

keterhubungan atau arahan dari pesan. Keterhubungan pesan mengindikasikan sikap pembicara (apakah ia berbicara secara bersahabat, sopan, atau lainnya) juga menginterpretasikan kata-kata (apakah sebagai gurauan, permintaan atau perintah). Keseluruhan pesan harus dipahami melalui hubungan antara komunikasi verbal dan nonverbal.

Komunikasi non verbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan. Menurut Strong dan DeVault dalam pernikahan, sebagai bentuk interaksi, komunikasi non verbal memiliki 3 fungsi, yaitu: (a) Menyampaikan perilaku antar pribadi. Pesan-pesan non verbal digunakan untuk menyampaikan sikap atau perasaan seperti berpegangan tangan dapat dilihat sebagai penanda keakraban, atau duduk berjauhan mengisyaratkan kita menjaga jarak; (b) Mengekspresikan Emosi. Tubuh kita adalah penanda emosi. Mengungkapkan emosi penting sekali dalam relasi suami istri karena hal tersebut menunjukkan bagaimana perasaan pasangan sehingga satu sama lain dapat meresponnya dengan benar; (c) Menandai Keberlangsungan Interaksi. Komunikasi nonverbal menjadi alat ukur terhadap minat dan perhatian kita. Sikap tubuh dan kontak mata adalah penanda penting (Strong dan DeVault, 1986:423).

Informan membangun komunikasi di ruang domestik dimana suami istri menciptakan iklim komunikasi yang kondusif yang melibatkan (1) dukungan pasangan, (2) keterbukaan antar pasangan, (3) adanya alokasi waktu untuk berinteraksi secara intens, dengan disertai (4) kesediaan mendengarkan dari keduanya.

2. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan pembahasan yang disajikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Negosiasi perempuan kader perempuan PKS di ruang domestik menghasilkan pola pembagian peran kader perempuan PKS berupa: (1) fungsi peran terbagi; (2) moderasi tugas-tugas domestik; (3) penyertaan seluruh anggota keluarga; (4) keterlibatan suami dalam keputusan dan kegiatan domestik; serta (5) adanya pembagian kerja situasional.

Informan membangun komunikasi di ruang domestik dimana suami istri menciptakan iklim komunikasi yang kondusif yang melibatkan dukungan pasangan, keterbukaan antar pasangan, adanya alokasi waktu untuk berinteraksi secara intens dengan disertai kesediaan mendengarkan dari keduanya.

Daftar pustaka

- Adler, Ronald B. & Neil Towne. (1999). *Looking Out Looking In*. USA: Harcourt Brace College Publisher.
- Andersen, Margareth L. & Howard F. Taylor. (2003). *The Essentials Sociology*. Belmont, California: Wadsworth.
- Anshori, Dadang S dkk. (1997). *Membincangkan Feminisme*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Newman, David M. (1997). *Sociology, Exploring the Architecture of Everyday Life*. California: Pine Forge Press.
- Nina, Andriana dkk. (2012). "Perempuan, Partai Politik dan Parlemen. Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal". Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. (2005). *Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Strong, Bryan & Christine DeVault. (1986). *The Marriage and Family Experience*. USA: West Publishing Company.
- Surbakti, EB. (2008). *Sudah Siakah Menikah? Panduan Bagi Siapa Saja yang Sedang dalam Proses Menentukan Hal Penting dalam Hidup*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tubbs, Stewart L. (2001). *Gendered Lives, Communication, Gender and Culture*. Belmont, California: Wardsworth.
- Wolf, Robin. (1996). *Marriages and Families in a Diverse Society*. New York: Harper Collins College Publishers.
- Jurnal Sosial Demokrasi. Edisi 6 Tahun 2 Juni - Agustus 2009.